

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan OPD mempunyai strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari kinerja 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

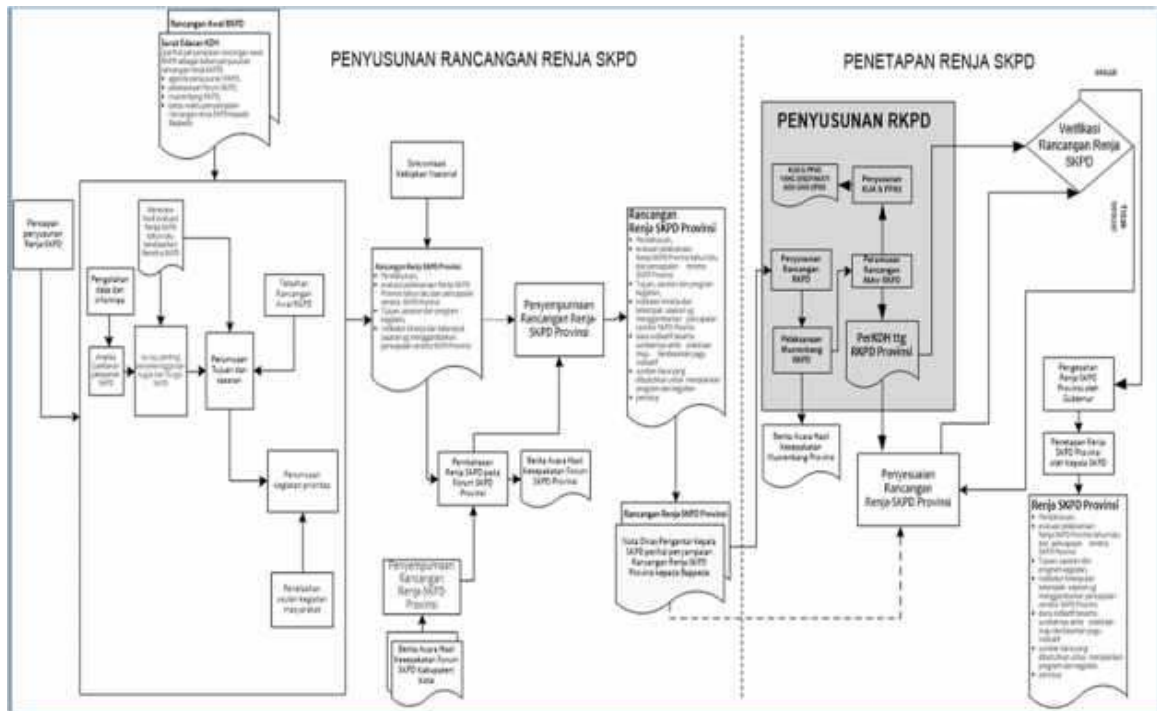
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

**Gambar.1**



**1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renjana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E)

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 8/D).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pnjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor...)

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021,dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran S ementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sebagai berikut:

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum Penyusunan
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

➤ **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN**

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

➤ **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

➤ **BAB IV PENUTUP**

LAMPIRAN :

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2021 Perangkat Daerah

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Tahun 2021 Perangkat Daerah

Tabel 3.2 : Matriks Rancangan Perubahan Rencan Kerja (RENJA) Tahun 2021 Perangkat Daerah.

## BAB II

### HASIL EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1

#### TAHUN BERJALAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Capaian kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pada tahun 2021 kurang memenuhi target yang ditetapkan, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perubahan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 dapat disimak penjelasan dibawah ini :

- Dari 5 program, kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian Realisasi yaitu :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **KABUPATEN/KOTA**

##### *A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*

##### *PERANGKAT DAERAH*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### *B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD

*C. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhann Barang Milik Daerah

*D. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*E. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

*F. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya

*G. PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### *H. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

#### *A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

#### *PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN*

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN  
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

*B. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

*PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA  
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI  
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI  
POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

*C. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

*PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN*

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah

**E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

*A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN*

*PEMANTAPAN KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL*

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring dann Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 62% yang meliputi 5 program yaitu :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA,**
2. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN,**
3. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN  
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK,**
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN,**
5. **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat,seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indicator capaian program dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 –2023. Dengan terpenuhinya target Renstra OPD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan secara langsung terwujud dalam meningkatnya semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, meminimalisir konflik ditengah masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik hal ini tentunya tertuang dalam tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor–factor penyebab terhambatnya pelaksanaan proram/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan. Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 disesuaikan dengan Renstra SKPD baik dari sasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu pada indicator tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun berjalan sebagaimana tertera dalam lampiran Tabel 2.1 sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD meliputi 5 Program yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA  
SERTA BUDAYA POLITIK
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN  
KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dan 12 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. *PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH*
2. *ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*
3. *ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*
4. *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*
5. *ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*
6. *PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAH DAERAH*
7. *PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*
8. *PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH*

1. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN*
2. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA  
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI  
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI  
POLITIK, PEMILIHAN UMUM /PEMILIHAN UMUM KEPLA DAERAH,  
SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*
3. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN*
4. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN  
PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL*

***Dan 31 Sub Kegiatan Antara Lain :***

1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  
Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
18. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang
23. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
25. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
26. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan



dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

27. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
28. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
29. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
30. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah.

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Program / Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	14
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ( Renja ) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 inimerupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi da Misi Bupati Bangkalan, serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena itu ada 4 Program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA,**
- 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN,**

3. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK,**
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,**
5. **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Program tersebut diatas penting untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2021, karena program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran Pembangunan Bangkalan tahun 2021.

Bangkalan,

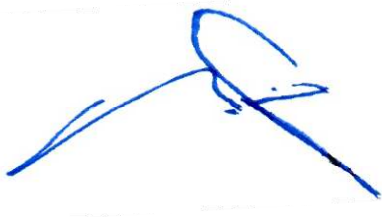
2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is centered on the page and appears to be a stylized representation of a name or initials.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Bakesbangpol**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / kegiatan pada akhir periode Renstra perangkat tahun 2018-2023		Realisasi target kinerja hasil program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)		Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( Tahun 2021 semester 1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%	
00.00.16.01	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	17	jenis	12		5	unit	5	unit	100%	17	jenis	34	2	
		Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	9	jenis	12	bln	12	bln	12	bln	1	9	jenis	36	4	
00.00.16.02	Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	30	kali	12	bln	12	bln	12	bln	100%	12	bln	36	1,2	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	100	kali	12	bln	12	bln	12	bln	100%			36	0,36	
00.00.16..03	Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	14	Dok	12	bln	12	bln	12	bln	1	12	bln	36	2,57	
00.00.16.04	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	40	jenis	12	bln	12	bln	12	bln	1	12	bln	36	0,9	
		Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara	13	jenis												
00.00.16.05	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis prasarana aparatur yang diadakan														
		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	13	jenis	12	bln	12	bln	12	bln	100%	17	jenis	41	3,15	
		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	30	unit	12	bln	12	bln	12	bln	100%			36	1,2	
00.00.16.06	Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan													-	
00.00.16.07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi/seminar	2	keg												
00.00.16.08	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang tersusun	2	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	1,5	
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	1	1 dok												
		Jumlah data dan informasi PD	1	data											-	
00.00.16.09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan triwulan & semesteran Monev PD yang tersusun (Renja/RKPD,APBD)	1	data	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3	

		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1	dok											-	
00.00.16.10	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun persemester/prognosis/fakhir tahun	1	dok		1	dok	1	dok	100%	1	dok	2	2		
0.00.16.11	Kegiatan Fasilitas Hari jadi	Jumlah kegiatan yg diikuti	1	keg	1	keg	1	keg	1	keg	100%	1	keg	3	3	
6.01.22	<b>Program Fasilitas Integrasi Bangsa</b>		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%	
6.01.22.01	Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	18	kec	150	org	1096	orang	1096	org	100%	231	orang	1.477	82,05	
6.01.22.02	Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat	Jumlah peserta bela negara	18	kec											-	
		Jumlah peserta sosialisasi pada masyarakat non PNS	115	orang	115	orang	115	orang	115	orang	100%	115	org	345	1,9	
		Jumlah peserta pelatihan/penataran/serba pembagian modul kader Bela Negara	18	keg												
6.01.22.03	Kegiatan Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar )	Jumlah peserta Forum Pembauran Bangsa yg mendapatkan sosialisasi	150	orang			55	orang	55	org	100%	84	org	139	1	
6.01.23	<b>Program Fasilitas Hubungan Antar Lembaga</b>															
6.01.23.01	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan	Jumlah lap.movev, belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3	
6.01.23.02	Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik	Jumlah peserta penyuluhan	140	orang	140	org	140	org	140	org	100%	140	org	420	3	
6.01.23.03	Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Jumlah LSM	120	orang	125	org	120	org	120	org	100%	120	org	365	3,04	
		Jumlah Orkemas yg terdaftar	1	dok												
		Laporan hasil pengawasan	1	dok											-	
6.01.23.04	Penyelenggaraan PEMILU	Laporan hasil dr pemilu PILEG dan PILPRES										1	kali			
		Laporan hasil pemilu PILKADES			1	kali									1	
		Laporan hasil dr pemilu PILGUBdan PILKADA	1	kali			1	kali	1	kali	100%				2	2
6.01.23.05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik	Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik	1	kali	3	kali								3	3	
		Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik														
		Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik													-	
6.01.23.06	Fasilitas Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta fasilitas bantuan keuangan parpol	30	orang	30	org	30	org	30	org	100%	30	org	90	3	
6.01.24	<b>Program Pemantauan Kajian Strategis</b>		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%	



6.01.24.01	Kegiatan Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	35	orang	1	dok	105	org	105	org	100%	140	org	211	6,02
6.01.24.02	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO	Pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3
6.01.24.03	Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	2	kali	1	dok	2	kali	2	kali	100%	1	dok	5	2,5
6.01.24.04	Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi politik di daerah	Pemantauan PILKADA dan PILGUB	1	kali			1	dok	1	dok	100%			1	1
		Pemantauan PILEG dan PILPRES	1	kali											0
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI													
8.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi													
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun										1	dok		
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun										4	dok		
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun										8	dok		
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			-							8	lap		
8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</b>													
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										41	ASN		
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun										1	dok		
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun										7	dok		
8.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia</b>													
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yg tersusun										7	lap		
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>													
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi										78	orang		
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>													
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										5	jenis		

8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										4	jenis		
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor										3	jenis		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										2	jenis		
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										5	jenis		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										158	kali		
8.01.01.2.09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>													
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										65	unit		
8.01.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>													
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat										3	jenis		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										4	jenis		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										19	jenis		
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>													
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										16	unit		
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya										1	unit		
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya										39	unit		
8.01.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>													
8.01.02.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>													
8.01.02.2.01.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah penerima LSM/Ormas, jumlah peserta sosialisasi, lap. Hasil sosialisasi dan pembinaan										13,80,2	or, lembaga, dok		

8.01.02.2.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>												
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Jumlah kegiatan PILKADES, Jumlah penerima hibh, Lap. Hasil PILKADES, sosialisasi PILKADES										3096,23,480	or, lembaga, dok, buah	
8.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Jumlah monitoring penerima hibah, jumlah penerima hibah, lap kegiatan monitoring penerima hibah										20,16,2	kali, lembaga, dok	
8.01.03.2.01.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI</b>												
8.01.03.2.01.05	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>												
8.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah rapat koordinasi forum kewaspadaan dini										13	orang	
8.01.04.2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah rapat koordinasi Forkopimda										40	orang	

8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Pemantauan orang asing, pemantauan PILKADES										1	kali,kec		
8.01.06	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>													
8.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>													
8.01.06.2.03	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan program kerja bidang integrasi bangsa										12	orang		
8.01.06.2.04	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rapat koordinasi perumusan bidang integrasi bangsa										12	orang		
8.01.06.2.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi pembauran bangsa										71	orang		

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710906 199202 1 003



















**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan				Sasaran				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Ket
		2020	2021			2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kasus sara / politik/bela negara yang terselesaikan	100%	100%	Meningkatnya masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%	100%	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerja sama pemerintah, Ormas, LSM dan Parpol	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol	100%	100%	
				Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%	100%	
				Terperihinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	80%	85%	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003









Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana (RENJA) Tahun 2021 Perangkat Daerah  
(Data Form 2 Fasilitas Perubahan RKP 2021)

FORM 2

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET			PAGU			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PROGRAM 1.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		KEGIATAN 1.1.Administrasi Umum	KEGIATAN 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....									
		SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN									
		1.1. Penyediaan barang	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	Jumlah Dokum Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	17 jenis	1 dok	1 dok	306.530.700	20.000.000	9.312.000	
		1.2. Penyediaan jasa	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di susun	9 jenis	4 dok	4 dok	908.820.000	5.000.000	1.895.000	
		1.3. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun	3 jenis	8 dok	8 dok	15.000.000	5.000.000	1.895.000	
		1.4. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang di susun	3 jenis	8 lap	8 lap	55.000.000	5.000.000	1.895.000	
		1.5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	KEGIATAN 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan		15 jenis			15.000.000			
		1.6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SUBKEGIATAN	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan		9 jenis						
		1.7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3 orang	41or/bln	41or/bln	66.000.000	3.565.894.514	3.408.094.922	
		1.8. Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	50 jenis	1 lap	1 lap	43.000.000	5.000.000	2.300.000	
		1.9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	JumlahLaporan Keuangan bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD yang tersusun	2 jenis	7 lap	7 lap	75.000.000	5.000.000	3.830.000	
		1.10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEGIATAN 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan		10 jenis			20.000.000			
		1.11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUBKEGIATAN	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan		30 jenis			20.000.000			

	1.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	8 jenis	7 lap	7 lap	10.000.000	16.750.100	15.740.000		
	1.13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEGIATAN 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan		1 ls							
	1.14. Penyediaan Makanan dan Minuman	SUBKEGIATAN	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan		1 ls							
	1.15. Pengadaan mobil jabatan	4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah mobil jabatan yang disediakan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 buah	78 Pegawai	78 Pegawai		76.967.900	67.924.950		
	1.16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	KEGIATAN 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan		10 buah							
	1.17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SUBKEGIATAN	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		10 jenis							
	1.18. Pengadaan mebeleur	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan meleur yang disediakan	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	200 buah	13 Jenis	13 Jenis		9.252.050	9.252.050		
	1.19. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	4 Jenis	4 Jenis		58.169.700	50.422.700		
	1.20. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	3 Jenis	3 Jenis		20.994.000	32.099.000		
	1.21. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 buah	2 jenis	2 jenis		30.947.290	38.644.960		
	1.22. Pemeliharaan rutin berkala mebeleur	5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemeliharaan rutin berkala mebeleur	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200 buah	5 jenis	5 jenis		8.100.000	7.200.000		
	1.23. Rehab sedang/berat rumah gedung kantor	5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rehab sedang/berat rumah gedung kantor yang disediakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 unit	158 kali	158 kali		76.498.000	47.213.000		
	KEGIATAN 1.2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KEGIATAN 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN										
	1.1. Pengadaan mesin/kartu absensi	6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan mesin/kartu absensi yang disediakan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan	1 buah	65 unit	65 unit		1.010.000	161.029.005		
	1.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	KEGIATAN 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan		77 orang							
	1.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SUBKEGIATAN	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan		77 orang							
	1.4. Pengadaan Pakaian Korpri	7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	Jumlah penyediaan jasa surat menurut	77 orang	3 jenis	3 jenis		6.213.000	5.503.400		
	1.5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77 orang	4 jenis	4 jenis		39.000.000	49.200.330		
	KEGIATAN 1.3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	77 orang	19 jenis	19 jenis		1.891.688.760	3.550.595.155		

	SUBKEGIATAN	KEGIATAN 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	SUBKEGIATAN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bimtek		77 orang			100.000.000					
	KEGIATAN 1.4. Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		16 unit	16 unit		142.980.800	54.615.479			
	SUBKEGIATAN	8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 unit	1 unit		9.350.000	47.690.000			
	1.1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 data	39 Unit	39 Unit	5.000.000	14.820.000	24.710.000			
	1.2. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan		Jumlah penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		4 dokumen			5.000.000					
	1.3. Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah		Jumlah penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah					5.000.000					
	1.4. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000					
	1.5. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi kinerja Perangkat Daerah					5.000.000					
	KEGIATAN 1.5. Administrasi Keuangan												
	SUBKEGIATAN												
	1.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		40 orang								
	1.2. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi		Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi		2 dok								
	1.3. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan		Jumlah penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan		2 dok								
	1.4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		3 dok			5.000.000					
	1.5. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah		jumlah penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah		1 lap			5.000.000					
	1.6. Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran		Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran		1 lap			5.000.000					
	1.7. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		1 lap			5.000.000					
	1.8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1 lap								



	2.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah peserta Forum Pembauran Bangsa yg mendapatkan sosialisasi				100.000.000				
	PROGRAM 3. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM 3. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
	KEGIATAN 3.1. Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	KEGIATAN 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
	SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN									
	3.1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.1. Pelaksanaan Koordinasi DiBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lap.monev, belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan	Jumlah kegiatan PILKADES Jumlah penerima hibah Laporan hasil PILKADES,HIBAH SosialisasiPILKADES	1 dok	3096 orang 2 lembaga 3 dokumen 480 buah	3096 orang 2 lembaga 3 dokumen 480 buah	19.995.000	2.500.000.000	3.434.440.000	
	3.2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah monitoring penerima hibah Jumlah penerima hibah Laporan kegiatan monitoring penerima hibah	20 Kali 16 lembaga 2 dokumen	20 Kali 16 lembaga 2 dokumen		2.061.594.100	1.963.634.100		



	4.1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan hasil dr pemilu PILEG dan PILPRES		4 laporan								
	4.2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan hasil pemilu PILKADES,		4 laporan								
	4.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan hasil dr pemilu PILGUBdan PILKADA		1 kali								
	KEGIATAN 4.3. Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik												
	SUBKEGIATAN												
	4.1. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik,		1 kali								





	SUBKEGIATAN	5.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		13 orang	13 orang		36.663.000	11.350.000		
	5.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	35 orang	40 orang	40 orang	50.000.000	500.000.000	405.010.000		
	5.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	Pemantauan Orang Asing Pemantauan Pemantauan PILKADES	35 orang	1 Kali 3 kecamatan	1 Kali 3 kecamatan	50.000.000	3.337.000	8.087.000		
	KEGIATANS.2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
	SUBKEGIATAN											
	5.2.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing		1 dokumen			11.000.000				

	5.2.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Rapat koordinasi		2 kali			25.630.000				
	5.2.3. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan PILKADA dan PILGUB		1 kali			0				
	5.2.4. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan PILEG dan PILPRES		1 kali			0				
	5.2.5. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan PILKADES		1 kali			131.211.200				
<b>Jumlah</b>								<b>2.637.191.900</b>	<b>11.309.230.214</b>	<b>13.570.770.951</b>		

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat semula Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD 2021
- (4) Kolom ini memuat Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKP 2021 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang/Covid-19 (Program/Kegiatan Baru pengisiannya tidak disandingkan dengan Program, kegiatan)
- (5) Kolom ini memuat semula Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKP 2021
- (6) Kolom ini memuat perubahan menjadi Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKP 2021 Perubahan
- (7) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKP 2021
- (8) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada APBD 2021
- (9) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKP 2021 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang/Covid-19
- (10) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKP 2021
- (11) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada APBD 2021

EKO SETIAWAN,S.Si., MT

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577  
**B A N G K A L A N**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 050/ /433.207/2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  
b. Bahwa Rencana Kerja merupakan Instrumen pertanggung jawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi pemerintah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000

3. tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
5. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
6. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
7. Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
9. Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
11. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
13. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

14. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah
15. daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (*Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2008 Nomor 310*);

16. .. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

- fungsi serta tata kerja Bakesbangpol  
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
18. Kabupaten Bangkalan tahun 2018;  
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
19. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45/ /Kpts/433.206/2018, tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten tahun 2018

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
Bab I : Pendahuluan  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun  
Lalu  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Bab V : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2021.

KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada

KELIMA : Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh BakesbangpolKabupaten Bangkalan beserta jajarannya dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : Agustus 2021

---

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710906 199202 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577  
**B A N G K A L A N**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.207/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2021

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  
3. Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);  
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
  8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
  9. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
  10. 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  11. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
  12. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
  13. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan panjang daerah, rencana
  14. pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;  
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (*Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2008 Nomor 310*);  
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor ..
  15. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;  
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun

16. 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat

17.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 terdiri dari pejabat dilingkup Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_ 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710906 199202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN

TANGGAL:

NOMOR :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BAKESBANGPOL KABUPATEN  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
	Ketua	Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM	Kepala Badan
	Wakil Ketua	MOHAMMAD TOHA, SP .MMP	Sekretaris
	Sekretaris	TAUFIKURRAKHMAN, SE	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
	Anggota	NURMA PRIYANTINI, SE	Kasubag Keuangan
		MUHAMMAD HILMI	Kasubag Umum
<b>2</b>	<b>Bidang Integrasi Bangsa</b>		
	Koordinator	BABOER RACHMAN S, SAP., M.Si	KABID IB
		M. MAKHRUS, Spd,M.Si	KASUBBID KETAHANAN BANGSA
		ACHMAD FATHONI, S.Ip. M.Si	KASUBBID PEMBAURAN BANGSA
<b>3</b>	<b>BIDANG HAL</b>		
	Koordinator	AMIR LUTFI, S.STP, M.Si	KABID HAL
		ABDUL AZIZ FURQON, SAP	KASUBBID HUBUNGAN PARPOL
		TAUFIQUR RUHMAN, SE	KASUBBID HUB. LSM, ORMAS ORPROF
<b>4</b>	<b>BIDANG KASTRA</b>		
	Koordinator	RULY YUNIS SETIAWATI, SE.MM	KABID KASTRA
		SAIFUDDIN, SE	KASUBBID IPOLEKSOSBUD
		VERY EKA SETIAWAN, S.Sos	KASUBBID PEMANTAUAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

